



BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

- tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Papua;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6883);
38. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
39. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
40. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
52. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 40);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2017 Nomor 1);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 98);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 88);
56. Peraturan Bupati Keerom Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 404);
57. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
58. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
59. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
60. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-30 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Keerom tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEEROM TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.236.019.833.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah.....	Rp	1.236.019.833.000,00
b. Belanja Daerah.....	Rp	1.236.019.833.000,00
	Surplus/defisit	Rp 0,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan.....	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto	Rp	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- | | |
|-----------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| c. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| d. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| e. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 |
| f. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025 |
| g. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 |
| h. Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Keerom ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 21 Januari 2025


BUPATI KEEROM,

PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
pada tanggal 22 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM


STENLY N. MONINGKA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2025 NOMOR 427

LAMPIRAN I



KABUPATEN KEEROM

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.496.701.402,00
4.1.01	Pajak Daerah	11.401.246.160,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.298.536.140,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.298.536.140,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1.298.536.140,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.096.390.020,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.096.390.020,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.096.390.020,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.100.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.100.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.100.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.333.961.150,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.333.961.150,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.333.961.150,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.175.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.175.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.175.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.900.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.900.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.900.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.450.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.450.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.450.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.047.358.850,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.047.358.850,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.047.358.850,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.045.455.242,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.137.500.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.042.500.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.042.500.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	95.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	95.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	782.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	707.500.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	707.500.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	75.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	75.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	125.455.242,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	125.455.242,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	125.455.242,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.250.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.250.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.250.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.250.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.800.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	500.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	584.767.100,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	84.767.100,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	84.767.100,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	366.577.600,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	366.577.600,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	366.577.600,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.377.490.800,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.377.490.800,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.377.490.800,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	200.000.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00
4.1.04.13.02.0038	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan	200.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	771.164.500,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	421.164.500,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	421.164.500,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	350.000.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	350.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.197.523.131.598,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.013.513.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	121.622.016.000,00
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	105.231.424.000,00
4.2.01.03.01.0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	105.231.424.000,00
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	16.390.592.000,00
4.2.01.03.04.0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	16.390.592.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	81.953.483.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	81.953.483.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	81.953.483.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.138.129.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.138.129.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.138.129.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.561.263.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	11.228.554.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	7.956.175.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.272.379.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	3.501.677.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	926.410.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.724.091.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	851.176.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.831.032.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.831.032.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	565.652.186.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	433.756.232.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	433.756.232.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	131.895.954.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.689.585.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	55.376.877.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.423.118.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	40.406.374.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	387.086.436.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	295.377.944.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	233.282.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	29.482.038.000,00
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	22.079.383.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.462.931.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.679.133.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	230.107.873.000,00
4.2.01.09.01.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	4.333.304.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	91.708.492.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.497.342.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	895.000.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.337.117.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	758.250.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	13.629.647.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.340.800.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.815.591.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.045.602.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.415.614.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.524.724.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.808.115.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.509.618.598,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	10.509.618.598,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.509.618.598,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.804.301.321,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.816.612,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.680.500.665,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.000.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.000.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.000.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.236.019.833.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	699.279.483.776,00
5.1.01	Belanja Pegawai	403.672.539.902,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	307.861.404.453,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	208.988.733.485,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	176.249.074.827,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.739.658.658,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.008.030.982,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.406.980.860,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.601.050.122,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	2.928.438.814,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2.928.438.814,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.937.294.482,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.924.266.922,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.027.560,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.205.873.368,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.229.649.818,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.976.223.550,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.072.906.146,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.483.341.224,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.589.564.922,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.418.161.012,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.418.161.012,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.219.846,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.594.298,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	625.548,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.848.306.016,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.259.001.726,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.589.304.290,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	583.533.860,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	505.635.844,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	77.898.016,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.432.156.264,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.198.469.846,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	233.686.418,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	23.434.750.178,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	23.434.750.178,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	69.946.975.710,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.221.961.710,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	26.221.961.710,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.725.014.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.337.117.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	13.629.647.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	758.250.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.145.979.797,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	132.024.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	132.024.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	52.143.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	52.143.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.253.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.253.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.031.925,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.031.925,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	21.552.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	21.552.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	287.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	287.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.170.400.272,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	81.779.600,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.465.504,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.084.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.290.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.290.400.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.073.718,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.548.980,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.548.980,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.165.498,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.165.498,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.080,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.080,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.400.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.400.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	431.200.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	151.200.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	151.200.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	280.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	280.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.105.906.224,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.105.906.224,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.105.906.224,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.699.190.978,00
5.1.02.01	Belanja Barang	80.163.318.009,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.163.318.009,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	195.505.417,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.266.163.090,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	663.701.100,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	48.802.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.046.031.214,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.794.960.801,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	202.403.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	97.957.358,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	74.300.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	243.083.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	209.692.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	744.718.364,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.641.063.223,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.883.754.532,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.588.274.504,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.024.013.600,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.576.183.852,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	123.360.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.620.633.272,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.343.776.644,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.257.720.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.582.988.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.794.181.238,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	28.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	438.750.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	926.100.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	284.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	463.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	73.587.835.743,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.456.929.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.770.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.612.150.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	200.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.360.700.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	34.400.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	32.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.904.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.414.196.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	46.089.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	847.440.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.036.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.980.200.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	294.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	62.100.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	655.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.869.050.400,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.098.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	570.240.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	199.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	606.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	149.827.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.724.478.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	179.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.698.352.100,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	33.048.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.046.788.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	239.210.000,00
5.1.02.02.01.0078	Belanja Sewa Jasa Internet	182.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	943.560.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	682.000.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	985.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.651.015.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	3.650.403.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	612.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.945.845.890,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	51.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.868.528.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.176.481.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	625.200.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.000.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	155.000.000,00
5.1.02.02.04.0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	5.636.890,00
5.1.02.02.04.0268	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metrologi	10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.935.129.650,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.382.284.650,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	19.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	200.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	33.845.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	300.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.515.180.203,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	595.565.820,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	120.224.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	373.890.383,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	25.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.898.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	3.898.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.000.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.185.736.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.459.992.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.211.050.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	514.694.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.659.834.920,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.799.781.200,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.418.271.200,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	222.660.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	74.220.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	473.480.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	73.140.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	63.470.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	155.550.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	118.990.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.432.394.220,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	442.394.220,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	970.000.000,00
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	20.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.387.659.500,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	137.659.500,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	350.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	700.000.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.382.789.072,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.382.789.072,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.664.087.422,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.718.701.650,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	490.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	490.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	490.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.415.413.234,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.415.413.234,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.415.413.234,00
5.1.05	Belanja Hibah	48.681.235.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	23.240.000,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	23.240.000,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	23.240.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.443.300.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.817.900.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.817.900.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	565.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	565.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.060.400.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.710.400.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.350.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	23.323.502.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	16.996.265.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	16.996.265.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.461.350.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.461.350.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.865.887.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.865.887.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	3.891.193.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	895.000.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	895.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.866.964.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.866.964.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.129.229.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.129.229.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.226.517.896,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	29.876.517.896,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	29.876.517.896,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	29.876.517.896,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.350.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.350.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.350.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	392.065.521.324,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.397.164.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.397.164.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.397.164.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.797.164.000,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.856.829.580,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.397.440.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.383.848.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	2.383.848.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	13.592.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	13.592.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.762.607.200,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.462.607.200,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.869.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	502.628.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	278.360.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.812.619.200,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.300.000.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.300.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	38.739.188,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	38.739.188,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	38.739.188,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.279.154.355,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	430.358.088,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	430.358.088,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.848.796.267,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	808.640.100,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	132.465.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	447.656.900,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.460.034.267,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.491.738.539,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	36.491.738.539,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	36.491.738.539,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.887.150.298,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.785.950.298,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.785.950.298,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	101.200.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	101.200.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.725.200.657,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	202.742.100.657,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	202.742.100.657,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.185.131.082,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	186.395.664.226,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.086.305.349,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	75.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	983.100.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	983.100.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	983.100.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.056.376.009,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	110.909.840.700,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	106.261.840.700,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	106.261.840.700,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.648.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.648.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	13.944.340.109,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	11.580.840.109,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.580.840.109,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.363.500.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.363.500.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	202.195.200,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	202.195.200,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	202.195.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	252.746.578,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	252.746.578,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	252.746.578,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	252.746.578,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.777.204.500,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	872.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	872.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	872.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.905.204.500,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.905.204.500,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.905.204.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	140.174.827.900,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	140.174.827.900,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	140.174.827.900,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	140.174.827.900,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	81.953.483.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	58.221.344.900,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Keerom, 21 Januari 2025

 **BUPATI KEEROM,**

PITER GUSBAGER